

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

(Hapsara & Sudirman, 2020) Menurut Meier (1995) dalam Kuncoro (2006), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang merupakan kunci dalam melihat suatu pengertian pembangunan ekonomi.

Tidak hanya menggambarkan tindakan kuantitatif perekonomian yang sedang berkembang seperti laju kenaikan pendapatan per kapita, pembangunan ekonomi juga menggambarkan perubahan ekonomi, sosial, dan hal lainnya yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga pembangunan ekonomi dapat

menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga (Jhingan, 2012:5).

Menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.

#### **2.1.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah**

(Sanjaya, 2014) Menurut Arsyad (2010) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Dalam pembangunan daerah diperlukan campur tangan pemerintah, jika pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh wilayah secara rata. Tidak meratanya pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah.

Yang menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah adalah penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik daerah. Hal tersebut akan mengarahkan kepada pengambilan gagasan yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan memacu kegiatan ekonomi.

### **2.1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi**

Gunar Myrdal memperkenalkan konsep dampak balik dan dampak sebar. Dalam pandangan teori ini, pembangunan ekonomi akan menghasilkan suatu proses sebab-akibat sirkuler yang membuat si kaya akan mendapatkan keuntungan semakin banyak, dan yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effects*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effects*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara berkembang.

Teori ini erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi di sekitar ide ketimpangan pada taraf nasional dan internasional. Di mana ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. (Fauziah, 2020) Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar.

(Fauziah, 2020) Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 1990).

### **2.1.2 Ketimpangan Pembangunan**

(M.Sesaria, 2020) Awal mula permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Teori tersebut memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008).

(Ari Mulianta Ginting, 2015) Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibatnya, kemampuan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Sehingga tidak mengherankan jika setiap daerah terdapat wilayah relatif maju dan wilayah relatif terbelakang (Sjafrizal,2012).

Ketimpangan bisa muncul karena tidak meratanya pembangunan ekonomi. Terlihat dengan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketidakmerataan ini terjadi karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Selain menciptakan kantong-kantong kemiskinan pada kawasan-kawasan terpencil, terisolir, kritis dan miskin sumber daya, ketimpangan pembangunan antar wilayah juga mengakibatkan terhambatnya perkembangan wilayah dikarenakan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial.

#### **2.1.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan**

Menurut Sjafrizal (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah, yaitu:

##### 1) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu terdapat sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, lebih meratanya fasilitas transportasi baik darat, laut, dan udara, kemudian yang terakhir yaitu kondisi demografis dengan kualitas yang lebih baik dan kuantitas yang mencukupi.

##### 2) Mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar kecamatan juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Ketika mobilitas barang dan jasa di suatu daerah kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Hal ini juga berlaku ketika migrasi kurang lancar, dimana ketika suatu daerah memiliki kelebihan tenaga kerja, maka tenaga kerja tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. Sehingga, ketimpangan ekonomi antar wilayah akan cenderung lebih tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan dan daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya.

### 3) Perbedaan kondisi demografis

Yang dimaksud dengan perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur penduduk, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, serta perbedaan etos kerja yang dimiliki masyarakat.

Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi. Kemudian, kondisi tersebut akan mendorong investasi ke daerah yang bersangkutan dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika kondisi demografis daerah kurang baik, maka tingkat produktivitas kerja masyarakat rendah dan hal ini kurang menarik bagi investor sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat.

#### 4) Perbedaan sumber daya alam

Kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada suatu daerah. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Sedangkan daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit, maka biaya produksi barang dan jasa akan lebih tinggi dan daya saing menjadi lemah sehingga hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih lambat. Dengan demikian, perbedaan sumber daya alam ini dapat mendorong ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi lebih tinggi.

#### 5) Alokasi dana pembangunan

Suatu daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari daerah lainnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Hal ini tentunya akan mendorong pembangunan daerah yang bersangkutan melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika investasi yang masuk ke suatu daerah tertentu lebih rendah, maka kegiatan ekonomi dan pembangunan daerahnya kurang berkembang baik.

### **2.1.2.2 Strategi Penanggulangan Ketimpangan Pembangunan**

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif. Sebagai upaya untuk mengatasi

permasalahan ketimpangan, pada tahun 2018 Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Indonesia *Development Forum* (IDF) akan mengangkat tujuh sub tema besar yang diharapkan dapat memberikan masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, yaitu :

1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan : Tantangan dan Praktik Baik. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), pemerintah telah membangun pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar pulau Jawa. Oleh karena itu, forum ini akan menjadi sangat penting untuk mencari upaya yang bisa mengoptimalkan peran pusat-pusat pertumbuhan tersebut.
2. Upaya Mengurangi Kesenjangan daerah Tertinggal dan Perbatasan. Masih terdapat 122 kabupaten tertinggal di Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya untuk mengentaskan daerah tertinggal tersebut dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya, adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.
3. Perbaikan Pelayanan Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah. Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia. Kualitas SDM yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah.



4. Memanfaatkan Potensi Ekonomi Digital untuk Mendorong Pembangunan Daerah. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat krusial sebagai penghubung masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing dan modernisasi ekonomi, menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial, serta mampu mengurangi kemiskinan. Beragam peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi ketimpangan wilayah.
5. Penguatan Konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional. Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik, disertai keterkaitan dengan daerah-daerah di sekitarnya (terluar, tertinggal, dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah.
6. Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah, permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.

7. Pengoptimalan Sumber Pendanaan Pembangunan. Saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN maupun non-APBN, seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA). Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan lainnya yang belum optimal dan sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah.

### 2.1.3 Pengukuran Ketimpangan Pembangunan

#### 2.1.3.1 Indeks Entrophy Theil

Pengukuran menggunakan indeks *entrophy theil* ini mempunyai kelebihan yaitu memungkinkan peneliti untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu secara lebih rinci dalam sub geografis yang lebih kecil. Indeks ini menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan dapat mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial. Indeks *Entrophy Theil* dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut (Kuncoro, 2002):

$$I(y) = \sum \frac{y_j}{Y} x \log\left[\left(\frac{y_j}{Y}\right) / \left(\frac{x_j}{X}\right)\right]$$

Dimana :

- $I(y)$  = Indeks *Entrophy Theil*
- $y_j$  = PDRB per kapita kota/kabupaten j
- $Y$  = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi
- $x_j$  = Jumlah penduduk kota/kabupaten j
- $X$  = Jumlah penduduk Provinsi

Indeks *Entropy Theil* memiliki indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata terjadinya pembangunan.

#### **2.1.4 Tipologi Klassen**

Tipologi klassen adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing- masing daerah. (Dwiwahju, 2016) Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah (Kuncoro, 2002).

Klasifikasi daerah menurut Tipologi Klassen adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah di atasnya.
2. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan daerah di atasnya.
3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan daerah di atasnya.

4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*), adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan daerah di atasnya.

**Tabel 2. 1 Klasifikasi Tipologi Klassen**

	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$R_i > R$	<p>Kuadran 1</p> <p>Daerah cepat maju dan cepat tumbuh</p>	<p>Kuadran 3</p> <p>Daerah berkembang cepat</p>
$R_i < R$	<p>Kuadran 2</p> <p>Daerah maju tapi tertekan</p>	<p>Kuadran 4</p> <p>Daerah relatif tertinggal</p>

*Sumber : Sjafrizal, 2008*

#### **2.1.4.1 Strategi Setiap Kuadran Tipologi Klassen**

1. Kuadran 1 (Daerah cepat maju dan cepat tumbuh )

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh perlu menetapkan kebijakan pembangunan dengan prioritas sektor unggulan atau basis dengan tetap memperhatikan sektor non basis secara proporsional.

2. Kuadran 2 (Daerah maju tapi tertekan)

Pemerintah melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan dana agar dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah hendaknya disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing daerah.

### 3. Kuadran 3 ( Daerah berkembang cepat)

Perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan pada sektor basis atau unggulan, serta sektor jasa-jasa dengan tetap memerhatikan sektor lainnya secara proporsional sesuai potensi dan peluang pengembangannya. Perlu mengembangkan kebijakan baru yang lebih mendorong, memfasilitasi, dan memberikan ruang bagi tumbuhnya investasi, yaitu melalui insentif pajak dan kemudahan berinvestasi.

### 4. Kuadran 4 (Daerah relatif tertinggal)

Diperlukan perhatian dan strategi khusus terutama dari instansi pemerintah dalam menangani kondisi tersebut. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memaksimalkan sektor-sektor usaha yang menurut analisis pada metode Tipologi Klassen masih berada dalam kategori potensial, dengan begitu diharapkan dapat memicu dan meningkatkan perekonomian pada daerah-daerah (relatif) tertinggal.

## **2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Sukirno (2011:331) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah. Terlebih hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama dalam rencana pembangunan. Melalui pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat perlahan. Sehingga dalam era otonomi, masing-masing daerah bersaing meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendorong kemakmuran masyarakat setempat (Sjafrizal, 2012: 89).

Menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa; (1) Meningkatnya secara terusmenerus persediaan barang; (2) teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

#### **2.1.5.1 Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Jhingan (2012) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi, yaitu:

##### **A) Faktor Ekonomi**

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai ketentuan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau bangunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut adalah:

1. Sumber Daya Alam
2. Akumulasi Modal
3. Organisasi
4. Kemajuan Teknologi
5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

#### B) Faktor Non Ekonomi

Faktor non ekonomi memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Nurkse, pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang historis. Berikut adalah Pokok perubahan faktor non ekonomi:

1. Faktor Sosial dan Budaya
2. Faktor Manusia
3. Faktor Politik dan Administratif

### **2.1.5.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

#### 1) Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith mengemukakan bahwa penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpaduan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000 : 53). Menurut pandangan tokoh-tokoh ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang

digunakan. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Tetapi para pakar ekonomi klasik pada umumnya hanya menitikberatkan pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Berdasarkan teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Faktor-faktor produksi yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah tenaga kerja dan kapital (modal). Teori ini membahas sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Model neo klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, pada awal proses pembangunan adalah kurang lancar, akibatnya modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan cenderung melebar. Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan meningkatnya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, negara yang bersangkutan akan semakin maju, maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang. Hipotesis ini kemudian dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).



### **2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme (UNDP)* memperkenalkan IPM yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian IPM dipublikasi secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.

IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata – rata lamanya, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan.

Sejak tahun 2014 ada perubahan dalam metodologi IPM dimana indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama sekolah dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Terdapat tiga indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat. Indikator yang diukur adalah Angka Harapan Hidup.

2. Pendidikan, berupa pengetahuan. Indikator yang digunakan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Ekonomi, berupa standar hidup layak. Indikator yang diukur adalah pengeluaran per kapita disesuaikan.

Adapun metode perhitungan IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik, yakni sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

IPM dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dalam empat kategori yang telah dikeluarkan oleh UNDP, yaitu rendah jika angka IPM < 50, menengah jika angka IPM 50 < IPM < 66, menengah atas jika angka IPM 66 < IPM < 80, dan tinggi jika angka IPM > 80.

### **2.1.7 Jumlah Penduduk**

Pada pasal 26 ayat 2 dalam UUD 1945 terdapat pengertian penduduk yang berbunyi penduduk Indonesia adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu dan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh suatu negara. Menurut Said (2001), penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang merupakan proses demografi.

Pertumbuhan penduduk yang pesat pada negara maju akan menyumbang terhadap kenaikan pendapatan riil per kapita. Dengan kondisi tersebut maka terkumpul tabungan yang siap untuk kebutuhan investasi. Maka dari itu tambahan penduduk di negara maju akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan juga sebagai permintaan yang baru. Berbanding terbalik dengan negara berkembang yang melihat pertumbuhan penduduk yang cepat akan menghambat perkembangan ekonomi. Adam Smith, Richardo, dan Robert Malthus berpendapat bahwa akan selalu saling berkejaran antara pertumbuhan output dengan pertumbuhan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, paling tidak akan terjadi kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Apabila penduduk tersebut mendapatkan pekerjaan maka akan meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tapi, jika tidak mendapatkan pekerjaan berarti mereka akan menanggung dan akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.

Di Indonesia yang masih menjadi permasalahan berkaitan dengan tiga hak, yaitu pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan perlu diturunkan, penyebaran penduduk antar daerah yang masih belum seimbang, dan kualitas kehidupan penduduk yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

### **2.1.8 Investasi**

Investasi adalah penanaman modal yang biasanya berjangka panjang dengan harapan bisa mendapat keuntungan di masa yang akan datang sebagai

kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi, dan risiko yang ditanggung. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sadono Sukirno,2011).

PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Investasi merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, sumber dana investasi berasal dari tabungan domestik, sedangkan perekonomian terbuka sumber dana yang diperoleh bisa melalui pinjaman luar negeri. Peran PMDN juga sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedudukan PMDN yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh negara.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat berkelanjutan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Peran ini bersumber dari tiga fungsi penting investasi yaitu:

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, maka dari itu kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja.
- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.
- 3) Bentuk-bentuk investasi yang sebenarnya bermacam-macam.

Tujuan dari penanaman modal adalah :

- 1) Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- 4) Mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan.
- 5) Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- 6) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 7) Menciptakan lapangan kerja.
- 8) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti selanjutnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi penulis, diantaranya:

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Judul/Penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. (Khoir Akfina Didia,2016)	Investasi, IPM, jumlah penduduk, ketimpangan pembangunan.	TPAK	Investasi berhubungan negatif namun tidak signifikan. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.
2.	<i>Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua.</i> (Michael Albert Baransano,dkk. 2016)	Ketimpangan pembangunan dan IPM.	PDRB per kapita, populasi, dan dana perimbangan.	Variabel PDRB per kapita, populasi, dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.
3.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. (Ketut Wahyu Dhyatmika, Hastarini Dwi Atmanti,2013)	Penanaman Modal Asing, ketimpangan pembangunan.	Pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran.	PMA berpengaruh positif. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif, dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten
4.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Antar Provinsi di Indonesia 2013-2017. (Muhammad Iqbal Maulana, 2019)	Ketimpangan pembangunan, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan laju pertumbuhan ekonomi.	Kapasitas listrik yang didistribusikan, dan industri.	Jumlah industri, PMA, dan PMDN berpengaruh positif dan signifikan. Kapasitas listrik yang didistribusikan berpengaruh negatif dan signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan.
5.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017. (Siska Andriani,2019)	IPM, investasi, dan ketimpangan pembangunan.	Upah minimum kabupaten/kota, angkatan kerja yang bekerja, dan dana alokasi umum.	Angkatan kerja yang bekerja dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan positif. IPM pengaruh negatif. Upah minimum dan investasi tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan.
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>

6.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Indonesia Bagian Timur. (Arsy Quraisyhab, Taufiq, dan Imam Asngari)	IPM dan ketimpangan pembangunan.	Tingkat kemiskinan.	IPM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, sedangkan kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan
7.	Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan investasi (PMA) terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2011-2016). (Rustianik Istiqomah, Arif Hoetoro)	Pertumbuhan ekonomi, IPM, investasi, dan ketimpangan pembangunan.		Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif, IPM tidak berpengaruh signifikan dan negatif. Sedangkan investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan.
8.	Dampak investasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan kawasan Timur Indonesia. (Rosmeli, 2015).	Investasi dan ketimpangan pembangunan.	Tenaga kerja.	PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan PMA dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan
9.	Analisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota dan faktor-faktoy yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. (Gantara Hadi Noto, 2016)	IPM dan ketimpangan pembangunan.	Upah minimin kab/kota (UMR), angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah.	UMR dan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan IPM dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.
10.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya. (Bakri, Syafrizal, Hasdi Aimon)	Investasi, ketimpangan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi.	Tenaga kerja, dan dana perimbangan.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif. Investasi berpengaruh secara signifikan dan positif. Dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

### **2.3.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan Pembangunan**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat merefleksikan keberhasilan pembangunan wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ketika suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat dikatakan wilayah tersebut juga mampu melaksanakan pembangunan dengan baik.

Model neo klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada awal proses pembangunan adalah kurang lancar, akibatnya modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan cenderung melebar. Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan meningkatnya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, negara yang bersangkutan akan semakin maju, maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang. Hipotesis ini kemudian dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur ketimpangan pembangunan antarwilayah akan menurun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusica, dkk (2018) yang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi



terhadap ketimpangan wilayah antar di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan menurunkan ketimpangan wilayah.

### **2.3.2 Hubungan Antara IPM Dengan Ketimpangan Pembangunan**

Tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah akan memberikan dampak pada tingkat produktivitas penduduk di wilayah tersebut. Semakin tinggi IPM maka produktivitas penduduk akan tinggi yang akan berpengaruh pada tingkat pendapatan yang diperoleh, begitu pula jika IPM rendah maka kualitas manusia di suatu wilayah akan rendah dan mempengaruhi rendahnya pendapatan. Yang menjadi masalah adalah IPM di setiap wilayah berbeda-beda, jika peningkatan IPM di suatu wilayah tidak diikuti dengan peningkatan IPM di daerah lain maka akan menimbulkan ketimpangan antar daerah. (Putri et al., 2015).

IPM yang semakin tinggi dan merata akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siska Andriani, 2019 menunjukkan bahwa IPM memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Diperkuat lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Kasus

Jawa Timur Tahun 2005-2011) hasilnya juga menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pamangunan.

### **2.3.3 Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dengan Ketimpangan Pembangunan**

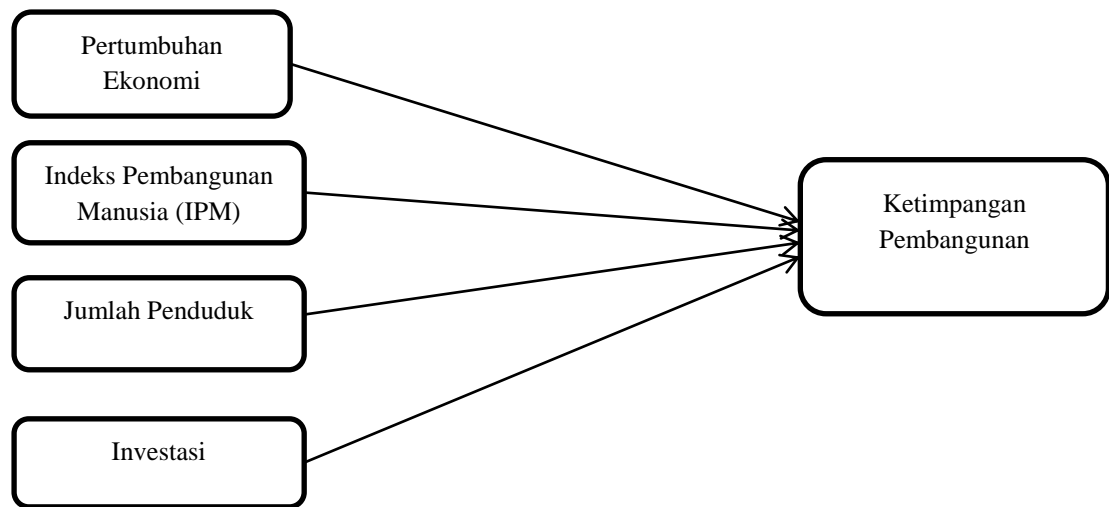
Jumlah penduduk dapat menjadi faktor yang meningkatkan ketimpangan apabila sebaran populasi penduduk tidak merata. Tidak meratanya jumlah penduduk yang menempati wilayah tertentu akan turut mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut. Menurut Sukirno (2007) perkembangan jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pembangunan karena adanya kemungkinan semakin banyak tenaga kerja yang dihasilkan, lalu terjadinya perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting diantaranya yaitu, pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Dan penduduk bisa disebut sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan didalam hidupnya. Adanya penyebaran penduduk yang tidak merata di setiap daerah/wilayah. Biasanya hal yang menyebabkan adanya ketidakmerataan ini adalah karena sumber daya yang dimiliki daerah/wilayah berbeda. Seseorang cenderung lebih menyukai daerah yang memiliki sumber daya yang banyak. Dengan adanya banyak sumber daya maka akan banyak lapangan kerja yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khoir Akfina Didia, 2016 menunjukkan bahwa variabel jumlah

penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

#### **2.3.4 Hubungan Antara Investasi Dengan Ketimpangan Pembangunan**

Investasi merupakan salah satu faktor fundamental dalam pembangunan wilayah untuk meningkatkan ketersediaan cadangan modal. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Investasi asing dipandang signifikan, karena akan memfasilitasi terjadinya transfer teknologi. Fluktuatifnya investasi di suatu wilayah dipengaruhi selain kebijakan yang ada, juga beberapa faktor baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Ini dikenal dengan konsep OLI (*ownership, location and internally*), yang dikemukakan oleh Dunning tahun 1981.

Investasi yang tinggi dapat digunakan untuk proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan per kapita (Sadono Sukirno, 1985) sehingga ketimpangan pembangunan akan menurun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuki Angelia, 2010 menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho (2021) yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi di Pulau Sumatera, dimana hasilnya menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan dari kerangka pemikiran yang telah digambarkan pada gambar 2.2, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh positif, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020.
2. Diduga secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, dan Investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020.